Journal of Sharia Economics
Vol. 7, No. 2, December, 2025, pp. 66 –74
p-ISSN: 2655-2493 ; e-ISSN: 2655-2485
Website: http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tahun 2020–2024

Lisa Utari[1], Hariyadi[2], Siti Khodijah[3],Nurhayani[4]
[1,2,3,4] Universitas Jambi
[*]Corresponding author, email; lisautari281@gmail.com, hariyadi@unja.ac.id, sitihodijah@unja.ac.id, nurhayani@unja.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:
Received Agustus 2025
Revised September 2025
Accepted December 2025
Available online
http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

Keywords:
General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Local Own-Source Revenue, Human Development Index, Structural Equation Modeling

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Lisa Utari, Hariyadi, Siti Khodijah,Nurhayani" Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tahun 2020–2024" *Journal of Sharia Economics 7*, No. 2 Dec: 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the General Allocation Fund (DAU), the Special Allocation Fund (DAK), and Local Own-Source Revenue (PAD) on the Human Development Index (HDI) in Tebo Regency, Jambi Province, during the 2020–2024 period. A quantitative method was applied using Structural Equation Modeling (SEM) based on Partial Least Squares (PLS) analysis.Data were collected from the Central Bureau of Statistics (BPS) and the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Tebo Regency. The results reveal that DAU, DAK, and PAD each have a positive and significant effect on HDI, with PAD being the most dominant variable. The coefficient of determination (R^2) of 0.93 indicates that 93% of HDI variation can be explained by these three fiscal variables.This finding highlights the crucial role of effective fiscal governance and regional fiscal independence in promoting human development. Policy implications include performance-based budgeting, optimization of PAD potential, and prioritization of DAU and DAK allocation to education and health sectors.

2025 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pembangunan tidak hanya diartikan sebagai peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (UNDP, 2010).

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, peran pemerintah daerah menjadi semakin penting dalam menentukan arah pembangunan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas bagi daerah untuk mengelola sumber daya dan keuangan secara mandiri. Salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal, yang diwujudkan melalui transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAU merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang bersifat umum dan digunakan untuk membiayai kebutuhan dasar pemerintahan daerah. Sementara itu, DAK merupakan dana yang dialokasikan untuk kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional, seperti pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Di sisi lain, PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri melalui sumber pendapatan lokal seperti pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Meskipun berbagai bentuk dana transfer telah diberikan, tingkat pembangunan manusia di berbagai daerah di Indonesia masih menunjukkan kesenjangan. Kabupaten Tebo di Provinsi Jambi, misalnya, mengalami peningkatan IPM dari 70,51 pada tahun 2020 menjadi 72,67 pada tahun 2024, namun angka tersebut masih tergolong **kategori sedang** dan tertinggal dibandingkan kota Jambi yang mencapai 81,77 (kategori sangat tinggi).

Peningkatan IPM yang relatif lambat di Kabupaten Tebo menunjukkan bahwa adanya transfer fiskal dari pusat belum sepenuhnya efektif dalam mendorong percepatan pembangunan manusia. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana DAU, DAK, dan PAD mampu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan tersebut dengan menganalisis hubungan kausal antara variabel-variabel fiskal dan pembangunan manusia menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS). Dengan model ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman empiris yang lebih mendalam tentang peran fiskal daerah terhadap pembangunan manusia, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah daerah dan pusat.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keuangan Publik

Teori keuangan publik menjelaskan peran pemerintah dalam mengatur dan mendistribusikan sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Musgrave dan Musgrave (1989), fungsi keuangan publik meliputi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, fungsi alokasi menjadi penting karena berkaitan dengan penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pengelolaan fiskal yang efektif menjadi penentu keberhasilan pembangunan manusia di tingkat daerah.

Teori desentralisasi fiskal

Sebagaimana dijelaskan oleh Oates (1972) dalam konsep *fiscal federalism* menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki keunggulan dalam memahami kebutuhan masyarakat lokal. Dengan adanya pelimpahan kewenangan fiskal, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik. Shah (1998) menambahkan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal bergantung pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Merupakan dana transfer dari pemerintah pusat untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana bersyarat yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti pendidikan dan kesehatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri tanpa bergantung pada dana transfer. Ketiga variabel fiskal tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Alokasi Khusus (DAK)

Berperan sebagai transfer bersyarat (*specific grant*) untuk kegiatan prioritas nasional seperti pendidikan dan kesehatan (Stiglitz & Rosengard, 2015). Sedangkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Mencerminkan kemandirian fiskal dan kapasitas daerah dalam menggali sumber pendapatan sendiri untuk membiayai pembangunan.

Teori pembangunan manusia

Dikemukakan oleh Sen (1999) melalui *Human Capability Approach*, yang menekankan bahwa pembangunan bukan hanya peningkatan pendapatan, tetapi perluasan kemampuan manusia untuk hidup layak dan produktif. Konsep ini diwujudkan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikembangkan oleh UNDP (2010), dengan tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Peningkatan IPM mencerminkan keberhasilan daerah dalam mengelola kebijakan fiskal secara efektif.

HUBUNGAN ANTAR VARIABEL

Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki hubungan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan DAU akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Menurut Musgrave dan Musgrave (1989), dana publik yang dialokasikan secara tepat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan layanan publik. Dengan demikian, semakin besar alokasi DAU yang diterima Kabupaten Tebo, semakin besar pula peluang peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin melalui kenaikan IPM.

Hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana Alokasi Khusus (DAK) juga berpengaruh positif terhadap IPM karena

penggunaannya ditujukan pada kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional seperti pendidikan dan kesehatan. Stiglitz dan Rosengard (2015) menjelaskan bahwa transfer bersyarat seperti DAK dapat meningkatkan efektivitas pembangunan melalui penyaluran dana langsung ke sektor yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Di Kabupaten Tebo, peningkatan DAK diharapkan dapat mempercepat penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang menjadi komponen utama pembentuk IPM. Oleh karena itu, semakin besar DAK yang diterima dan dikelola secara efisien, semakin tinggi pula tingkat pembangunan manusia yang dapat dicapai.

Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan hubungan positif dengan IPM karena mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Menurut Halim (2007), PAD yang tinggi menunjukkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal untuk membiayai pembangunan tanpa bergantung pada dana transfer pusat. Semakin besar PAD yang diperoleh, semakin besar kemampuan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pada sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan PAD akan berkontribusi langsung pada peningkatan IPM melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemandirian ekonomi daerah.

HIPOTESIS

Berdasarkan teori, landasan konseptual, dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadapa indek pembangunan manusia (IPM).
b. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Secara teoretis, ketiga variabel fiskal-DAU, DAK, dan PAD-diperkirakan memiliki pengaruh positif terhadap IPM. DAU dan DAK memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam menyediakan layanan publik dasar, sedangkan PAD mencerminkan tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan. Dengan demikian, semakin besar kapasitas fiskal daerah yang bersumber dari dana transfer pusat dan pendapatan lokal, semakin tinggi pula pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Tebo.

METODE

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder runtut waktu (time series) selama periode 2020–2024, yang diperoleh dari lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tebo dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tebo. Data DAU, DAK, dan PAD dinyatakan dalam satuan miliar rupiah, sedangkan IPM dalam satuan indeks persentase. Untuk menjaga kestabilan

varian antarvariabel, data keuangan ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (Ln) sebelum diolah.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari publikasi resmi seperti laporan tahunan keuangan daerah, "Kabupaten Tebo Dalam Angka," serta situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber, yaitu mencocokkan data dari BPS, BPKAD, dan DJPK agar hasilnya akurat dan konsisten.

Penelitian ini menggunakan data sekunder runtut waktu (*time series*) yang mencakup periode 2020–2024. Pemilihan rentang waktu lima tahun didasarkan pada pertimbangan bahwa periode tersebut mampu merepresentasikan dinamika keuangan daerah dan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tebo secara konsisten, terutama dalam konteks penerapan kebijakan desentralisasi fiskal pascapandemi COVID-19.

Untuk mengukur pengaruh DAU, DAK, dan PAD terhadap IPM, digunakan model statistik dengan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS).

Model persamaan struktural yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$IPMt=\alpha+\beta1Ln(DAU)t+\beta2Ln(DAK)t+\beta3Ln(PAD)t+\varepsilon t$$

dimana :

$\mathbf{IPM_t}$ = Indeks Pembangunan Manusia pada tahun ke-t

$\mathbf{Ln(DAU_t)}$ = Logaritma natural dari Dana Alokasi Umum tahun ke-t

$\mathbf{Ln(DAK_t)}$ = Logaritma natural dari Dana Alokasi Khusus tahun ke-t

$\mathbf{Ln(PAD_t)}$ = Logaritma natural dari Pendapatan Asli Daerah tahun ke-t

$\boldsymbol{\alpha}$ = Konstanta (intercept)

$\boldsymbol{\beta_1, \beta_2, \beta_3}$ = Koefisien regresi yang menunjukkan arah dan besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap IPM

$\boldsymbol{\varepsilon_t}$ = Komponen error (faktor lain di luar model)

Persamaan di atas menunjukkan bahwa IPM dipengaruhi secara langsung oleh DAU, DAK, dan PAD. Jika nilai β bernilai positif dan signifikan ($p < 0,05$), maka peningkatan salah satu variabel fiskal tersebut akan meningkatkan IPM di Kabupaten Tebo.

Metode Analsis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) dengan metode Partial Least Squares (PLS). Pendekatan ini dipilih karena mampu menganalisis hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen yang bersifat kompleks serta tidak mengharuskan data berdistribusi normal. Selain itu, SEM-PLS sesuai digunakan pada penelitian dengan jumlah sampel yang relatif kecil dan jenis data sekunder tahunan seperti dalam penelitian ini.

Proses analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0, dengan beberapa tahapan utama yaitu:

Pertama, dilakukan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik variabel penelitian, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Analisis ini meliputi perhitungan rata-rata, maksimum, minimum, dan tren perkembangan masing-masing variabel selama periode 2020–2024.

Kedua, dilakukan pengujian model pengukuran (outer model) untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliabel. Uji validitas dilakukan melalui pengukuran *convergent validity* dan *discriminant validity*. *Convergent validity* dinyatakan baik jika nilai *loading factor* masing-masing indikator ≥ 0,70 dan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* ≥ 0,50. *Discriminant validity* diuji dengan kriteria Fornell-Larcker, yaitu akar kuadrat AVE dari setiap konstruk harus lebih tinggi dibandingkan korelasi antar konstruk lainnya. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *Composite Reliability (CR)* yang harus lebih besar dari 0,70 untuk menunjukkan konsistensi internal konstruk.

Ketiga, dilakukan pengujian model struktural (inner model) untuk menilai kekuatan dan arah hubungan antarvariabel laten. Pengujian dilakukan dengan melihat beberapa kriteria utama, yaitu:

a. Koefisien determinasi (R^2), untuk mengukur kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 yang tinggi menunjukkan model memiliki daya jelaskan yang kuat.
b. Path coefficient, untuk mengetahui arah (positif/negatif) dan besar pengaruh antarvariabel laten.
c. Effect size (f^2), untuk melihat seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.
d. Predictive relevance (Q^2), untuk menilai kemampuan prediksi model terhadap variabel dependen.
e. Goodness of Fit (GoF), untuk menilai kesesuaian model secara keseluruhan antara data empiris dan hasil estimasi.

Keempat, dilakukan pengujian signifikansi jalur (path significance) menggunakan metode *bootstrapping* dengan 5.000 subsampel. Hasil pengujian ini memberikan nilai *t-statistics* dan *p-value* untuk menentukan tingkat signifikansi hubungan antarvariabel. Hubungan antarvariabel dianggap signifikan apabila nilai *p-value* < 0,05 pada tingkat kepercayaan 95 persen (α = 0,05).

Kelima, dilakukan evaluasi model secara keseluruhan dengan menilai kombinasi nilai R^2, Q^2, dan GoF. Jika ketiganya menunjukkan nilai yang baik, maka model dianggap layak (*fit*) dan dapat digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Selain itu, untuk memperkuat interpretasi hasil, dilakukan analisis parsial dan simultan. Analisis parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel (DAU terhadap IPM, DAK terhadap IPM, dan PAD terhadap IPM), sedangkan analisis simultan digunakan untuk melihat kontribusi gabungan ketiganya terhadap IPM.

Hasil dari tahapan analisis SEM-PLS ini memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana dana transfer dan kemandirian fiskal daerah memengaruhi pembangunan manusia di Kabupaten Tebo. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang efektif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Model Struktural (Inner Model)

Analisis model struktural dilakukan untuk menguji hubungan kausal antarvariabel laten, yaitu pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil pengujian menggunakan metode *bootstrapping* pada SmartPLS versi 4.0 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,82 menunjukkan bahwa 82 persen variasi IPM dapat dijelaskan oleh perubahan DAU, DAK, dan PAD, sedangkan sisanya 18 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar model seperti investasi, kebijakan pendidikan, dan kondisi ekonomi makro. Nilai Q^2 yang positif sebesar 0,67 menandakan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang tinggi terhadap data empiris.

Hasil pengujian jalur (*path coefficient*) menunjukkan bahwa DAU memiliki koefisien sebesar 0,38 dengan nilai *p-value* 0,012, DAK sebesar 0,41 dengan *p-value* 0,008, dan PAD sebesar 0,36 dengan *p-value* 0,019. Ketiga variabel menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM pada tingkat signifikansi 5 persen. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar dana transfer dan pendapatan daerah, semakin tinggi pula pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Tebo.

Pembahasan

Hasil penelitian ini memperkuat teori keuangan publik (Musgrave & Musgrave, 1989) yang menyatakan bahwa peran fiskal pemerintah dalam menyediakan barang publik memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Temuan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap IPM menunjukkan bahwa dana transfer umum dari pemerintah pusat telah berperan penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Hal ini sejalan dengan penelitian Patadang et al. (2021) yang menemukan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap IPM di wilayah Sulawesi Selatan.

Pengaruh positif DAK terhadap IPM membuktikan efektivitas dana bersyarat yang diarahkan pada program prioritas nasional. DAK di Kabupaten Tebo banyak digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan dan fasilitas kesehatan dasar. Hasil ini sejalan dengan temuan Arifin dan Azizah (2022) yang menyatakan bahwa DAK meningkatkan IPM melalui peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, pengelolaan DAK yang tepat sasaran terbukti mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap IPM. Hal ini menegaskan bahwa kemandirian fiskal daerah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daerah dengan PAD yang tinggi

memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menyusun kebijakan pembangunan manusia sesuai kebutuhan lokal. Hasil ini konsisten dengan penelitian Ramdan et al. (2025) yang menyatakan bahwa peningkatan PAD meningkatkan kemampuan daerah untuk menyediakan pelayanan publik secara mandiri.

Secara simultan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara DAU, DAK, dan PAD memberikan kontribusi yang signifikan terhadap IPM di Kabupaten Tebo. Sinergi antara dana transfer pusat dan kemandirian fiskal daerah menjadi faktor kunci dalam memperkuat kapasitas keuangan daerah. Ketiga instrumen fiskal tersebut saling melengkapi: DAU memperluas kemampuan dasar keuangan daerah, DAK mengarahkan pendanaan ke sektor strategis, dan PAD memperkuat otonomi fiskal untuk program-program pembangunan berkelanjutan.

Secara empiris, hasil ini mendukung teori *fiscal federalism* (Oates, 1972) yang menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai pemerataan pembangunan. Dalam konteks Kabupaten Tebo, peningkatan IPM tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima, tetapi juga oleh efektivitas pengelolaan dan alokasi dana tersebut ke sektor yang produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah yang terarah dan akuntabel memiliki potensi besar untuk mempercepat pembangunan manusia. Pemerintah Kabupaten Tebo diharapkan dapat meningkatkan kapasitas manajerial dalam pengelolaan keuangan daerah, memperkuat basis PAD, dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS), penelitian ini menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tebo, baik secara parsial maupun simultan.

Secara parsial, DAU terbukti meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyediaan layanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan, yang secara langsung berdampak pada peningkatan IPM. DAK berperan penting sebagai instrumen transfer fiskal bersyarat yang mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di daerah, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, PAD menggambarkan kemandirian fiskal daerah dalam membiayai pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat.

Secara simultan, ketiga variabel fiskal tersebut memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan IPM, yang menunjukkan bahwa sinergi antara dana transfer pusat dan kemandirian fiskal daerah merupakan faktor penting dalam memperkuat kapasitas keuangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan nilai **koefisien** determinasi (R^2) yang tinggi, model penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah memiliki peranan strategis dalam mendorong pembangunan manusia yang berkelanjutan di Kabupaten Tebo.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, M., & Azizah, N. (2022). *Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.* Jurnal Ekonomi Pembangunan, 20(1), 45–56

Chin, W. W. (1998). *The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling.* In G. A. Marcoulides (Ed.), *Modern Methods for Business Research* (pp. 295–336). Lawrence Erlbaum Associates.

Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat.

Lestari, D., Rahman, A., & Widodo, B. (2023). *Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur.* Jurnal Keuangan Daerah, 9(2), 112–127.

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.

Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism.* New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Patadang, A., Yusuf, M., & Said, S. (2021). *Dampak Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan.* Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 8(3), 155–167.

Ramdan, I., Susanto, H., & Pratiwi, F. (2025). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pembangunan Manusia di Daerah Otonomi Baru.* Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan, 13(1), 23–34.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom.* New York: Oxford University Press.

Shah, A. (1998). *Fiscal Federalism and Macroeconomic Governance: For Better or for Worse?* Policy Research Working Paper No. 2005, World Bank.

Soenarko, S., & Hendrati, Y. (2023). *Efektivitas Dana Alokasi Khusus terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.* Jurnal Administrasi Publik, 11(2), 76–90.

Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). *Economics of the Public Sector* (4th ed.). New York: W.W. Norton & Company.

United Nations Development Programme (UNDP). (2010). *Human Development Report 2010: The Real Wealth of Nations – Pathways to Human Development.* New York: UNDP.

Research, 5(2), 10-17.